

KAJIAN INOVASI GAWAI ADMINISTRASI PERIZINAN ONLINE (GASPOL)

TAHUN 2024



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta

 0264-8224794

 dpmpstsp.purwakartakab.go.id

 081809898111

 [dpmpstsp.purwakarta](https://www.instagram.com/dpmpstsp.purwakarta)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya dokumen kajian inovasi **GASPOL (Gawai Administrasi Perizinan Online)** ini. Kajian ini merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung percepatan pelayanan publik berbasis digital yang inklusif dan efisien, sejalan dengan kebutuhan masyarakat di era transformasi digital.

Inovasi dalam pelayanan publik, terutama di bidang perizinan, menjadi sebuah keharusan guna meningkatkan kualitas layanan dan transparansi pemerintahan. GASPOL dirancang untuk menjawab tantangan tersebut dengan menghadirkan kemudahan, kecepatan, dan aksesibilitas dalam proses pengurusan izin secara daring.

Kami menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan kajian ini. Ucapan terima kasih secara khusus kami tujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta masyarakat dan pelaku usaha yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan inovasi ini.

Kami berharap, kajian ini dapat menjadi pedoman strategis dalam pengembangan dan implementasi GASPOL, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Purwakarta. Semoga dokumen ini mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pelayanan publik, peningkatan investasi, dan kesejahteraan masyarakat.

Purwakarta, November 2024

Ketua Tim Pengelolaan Inovasi
DPMPTSP Kabupaten Purwakarta



KUNTO ADJIE WIBOWO, SP., M.Tr.AP.

NIP. 19861118 200501 1 002



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu masalah utama adalah ketergantungan pada proses manual yang sering kali tidak efisien dan memakan waktu lama. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengurusan izin kerap menimbulkan keluhan dari masyarakat dan pelaku usaha, terutama terkait dengan lamanya waktu penyelesaian dan ketidakpastian prosedur.

Aksesibilitas layanan publik juga menjadi tantangan besar, terutama di daerah terpencil yang memiliki infrastruktur digital terbatas. Ketimpangan ini sering kali membuat masyarakat di wilayah tersebut kesulitan untuk mendapatkan layanan yang memadai, sehingga menimbulkan kesenjangan pelayanan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Revolusi digital menghadirkan solusi yang sangat relevan untuk menjawab tantangan dalam pelayanan publik. Dengan adopsi teknologi informasi, proses pelayanan dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan terukur. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memanfaatkan teknologi dalam tata kelola pemerintahan.

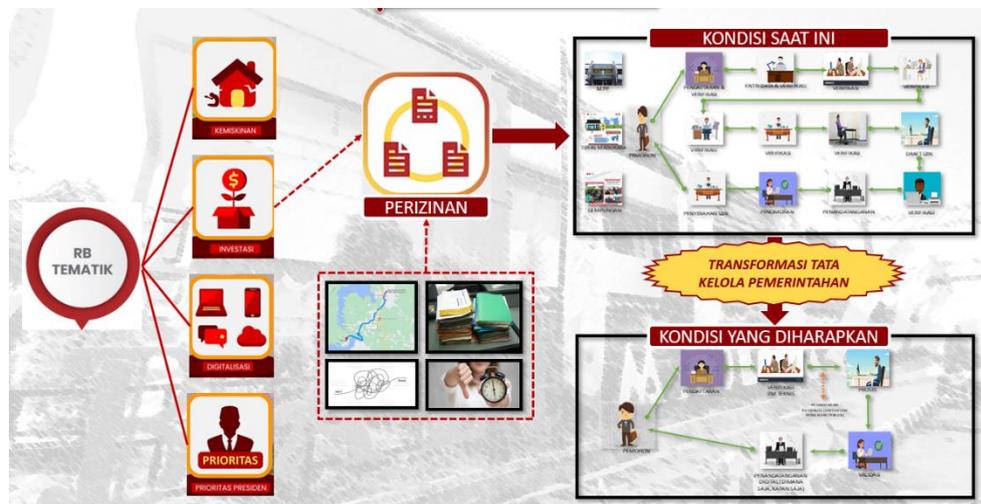
Digitalisasi pelayanan publik tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memungkinkan terwujudnya pelayanan yang lebih inklusif. Masyarakat di daerah terpencil dapat mengakses layanan tanpa harus datang ke kantor pemerintah secara fisik, sementara pelaku usaha dapat menikmati kemudahan dalam mengurus berbagai izin yang mendukung investasi mereka.

Sebagai respons terhadap tantangan dan urgensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) meluncurkan inovasi **GASPOL (Gawai Administrasi Perizinan Online)**. Inovasi ini bertujuan untuk



mendekatkan layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha melalui *platform* daring yang efisien, transparan, dan mudah diakses.

GAPOL dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan dengan mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu sistem yang terpusat. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Purwakarta tidak hanya berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga mendukung pertumbuhan investasi daerah. Inovasi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital dan meningkatkan daya saing Purwakarta di tingkat nasional.



Gambar 1. Kerangka Berfikir Inovasi Aplikasi GASPOL

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Penyusunan kajian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem GASPOL agar menjadi *platform* layanan perizinan yang terintegrasi, efisien, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Sistem ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, serta mendukung digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan daerah.

GASPOL diharapkan tidak hanya menjadi solusi teknis untuk perizinan, tetapi juga alat strategis dalam menciptakan pemerintahan yang inklusif. Platform ini dirancang agar mampu menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Purwakarta, termasuk daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan publik konvensional.

1.2.2. Tujuan

Aplikasi GASPOL menawarkan berbagai manfaat yang signifikan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat umum. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari aplikasi GASPOL :

1. **Mempercepat Proses Pengurusan Perizinan.**
Mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan izin, dari pengajuan hingga penerbitan, melalui automasi dan integrasi data antar instansi terkait.
2. **Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan.**
Menyediakan platform digital yang memungkinkan masyarakat memantau status permohonan izin secara real-time, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan publik.
3. **Memberikan Kemudahan Akses Layanan Perizinan.**
Menyediakan layanan berbasis web dan aplikasi mobile yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu datang langsung ke kantor dinas untuk mengurus perizinan.
4. **Meningkatkan Efisiensi Biaya dan Waktu.**
Mengurangi biaya operasional, baik untuk masyarakat maupun pemerintah, dengan meminimalkan proses manual dan perjalanan fisik dalam pengurusan perizinan.
5. **Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).**
Mendukung prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi yang inovatif.
6. **Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah.**
Mempermudah investasi dan kegiatan usaha dengan menyediakan layanan perizinan yang cepat dan ramah pengguna, sehingga menciptakan iklim usaha yang kondusif.
7. **Meningkatkan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN).**
Memberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi ASN untuk mengoperasikan aplikasi GASPOL, sehingga menciptakan budaya kerja berbasis teknologi dan inovasi.

8. **Mengintegrasikan Sistem Layanan dengan OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*).**
Menghubungkan GASPOL dengan *platform* perizinan nasional untuk mendukung sistem perizinan terintegrasi yang lebih luas dan sinergis.
9. **Mempermudah Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Layanan.**
Menyediakan data dan laporan yang akurat dan terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
10. **Mengurangi Beban Administrasi Manual.**
Mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, sehingga mempercepat proses dan mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan data.

1.3. Landasan Hukum

Penyelenggaraan inovasi GASPOL (Gawai Administrasi Perizinan Online) didasarkan pada berbagai aturan hukum yang menjadi pedoman untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pemanfaatan teknologi. Berikut adalah landasan hukum yang relevan:

1. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).**
Memberikan kerangka hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, termasuk dalam penyelenggaraan layanan berbasis digital seperti GASPOL.
2. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.**
Menegaskan pentingnya standar pelayanan publik yang meliputi kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. GASPOL bertujuan untuk memenuhi prinsip-prinsip ini melalui penyelenggaraan layanan perizinan yang responsif dan berbasis teknologi.
3. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.**
Mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, termasuk kewenangan dalam memberikan

elayanan perizinan kepada masyarakat. GASPOL mendukung implementasi otonomi daerah melalui optimalisasi pelayanan publik berbasis digital.

4. **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).** Mendorong seluruh instansi pemerintah untuk mengintegrasikan teknologi dalam sistem pelayanan, guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, efisien, dan inovatif. GASPOL selaras dengan kebijakan SPBE dalam mendukung transformasi digital di sektor publik.
5. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.** Memberikan arahan teknis bagi pemerintah daerah dalam mengelola pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). GASPOL sebagai bagian dari inovasi PTSP di Purwakarta mendukung pelaksanaan peraturan ini dengan memanfaatkan teknologi digital.

Dengan landasan hukum tersebut, inovasi GASPOL tidak hanya mendukung transformasi pelayanan perizinan tetapi juga memperkuat upaya pemerintah daerah dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.



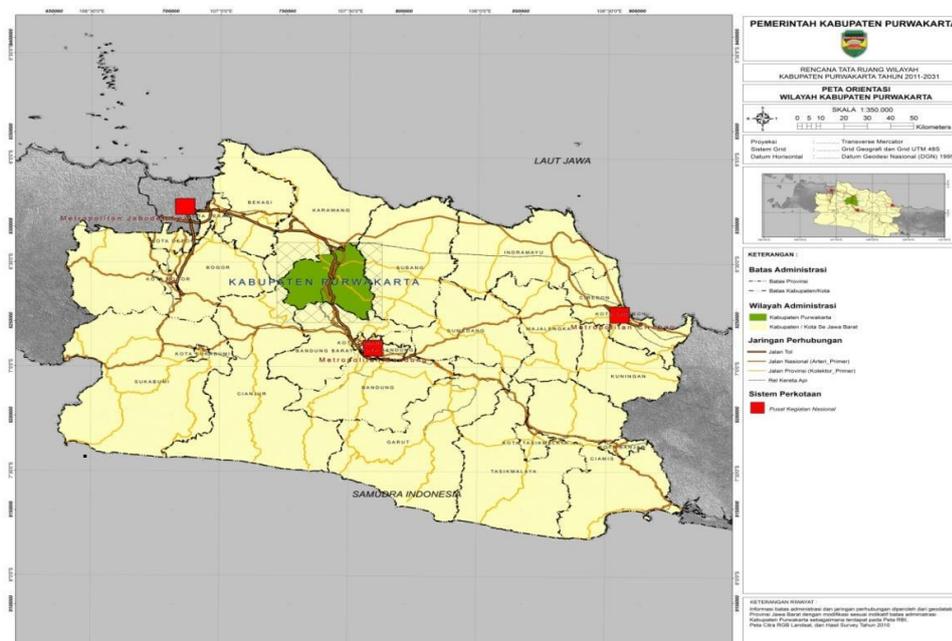
BAB II

PROFIL KABUPATEN PURWAKARTA

Kabupaten Purwakarta adalah salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi ekonomi, sosial, dan budaya yang beragam. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu daerah strategis di Jawa Barat karena lokasinya yang berada di jalur penghubung antara Jakarta dan Bandung, sehingga menjadi simpul penting dalam pertumbuhan ekonomi regional.

2.1. Letak Geografis dan Demografi

Kabupaten Purwakarta terletak di bagian barat Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah sekitar 971,72 km². Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Karawang di utara, Kabupaten Subang di timur, Kabupaten Bandung Barat di selatan, dan Kabupaten Bekasi di barat. Secara topografi, Purwakarta memiliki kombinasi wilayah dataran rendah, perbukitan, dan pegunungan, yang memberikan potensi besar untuk pengembangan berbagai sektor ekonomi.



Gambar 2. Peta Orientasi Kabupaten Purwakarta

Jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta mencapai 997.869 jiwa (berdasarkan data Tahun 2022), dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi di daerah perkotaan seperti Kecamatan Purwakarta. Penduduknya terdiri dari beragam etnis dan budaya, yang menjadi kekayaan sosial-budaya wilayah ini.

2.2. Potensi Ekonomi

1. Sektor Industri

Kabupaten Purwakarta dikenal sebagai salah satu kawasan industri utama di Jawa Barat. Berbagai zona industri terintegrasi seperti Kawasan Industri Kota Bukit Indah menjadi daya tarik bagi investor lokal maupun internasional. Jenis industri yang berkembang meliputi manufaktur, tekstil, otomotif, hingga elektronik.

2. Sektor Pertanian

Meskipun memiliki kawasan industri yang luas, sektor pertanian tetap menjadi salah satu penopang ekonomi. Komoditas unggulan meliputi padi, palawija, dan hortikultura. Selain itu, sektor peternakan juga berkembang, terutama sapi potong dan unggas.

3. Sektor Pariwisata

Purwakarta memiliki potensi wisata yang beragam, mulai dari wisata alam seperti Waduk Jatiluhur dan Gunung Parang hingga wisata budaya seperti Kampung Sadang dan Taman Air Mancur Sri Baduga. Pariwisata ini tidak hanya menarik wisatawan lokal tetapi juga dari luar daerah.

4. Sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif turut memberikan kontribusi signifikan bagi ekonomi daerah. Produk-produk khas Purwakarta seperti kerajinan bambu, makanan ringan, dan kain batik semakin diminati, baik di pasar lokal maupun nasional.

2.3. Infrastruktur dan Konektivitas

Purwakarta memiliki infrastruktur transportasi yang cukup memadai, seperti akses jalan tol Jakarta-Cikampek dan Cipularang, yang menjadikan wilayah ini mudah diakses dari berbagai daerah. Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan jaringan telekomunikasi terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.



2.4. Komitmen Peningkatan Pelayanan Publik

Kabupaten Purwakarta berkomitmen untuk meningkatkan daya saingnya melalui inovasi pelayanan publik. GASPOL adalah salah satu contoh konkret dari upaya ini, bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan perizinan, mendukung investasi, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

2.5. Peluang Pengembangan

Dengan posisi strategis dan potensi ekonomi yang melimpah, Kabupaten Purwakarta memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat. Melalui pemanfaatan teknologi, seperti penerapan sistem GASPOL, Purwakarta dapat mempercepat transformasi digitalnya dan meningkatkan daya tarik bagi investor serta pelaku usaha.

Kabupaten Purwakarta terus berupaya mengoptimalkan seluruh potensinya untuk mewujudkan visi sebagai daerah yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kombinasi antara potensi lokal, inovasi teknologi, serta dukungan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam mencapai target pembangunan tersebut.



BAB III

ISU STRATEGIS

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kabupaten Purwakarta menghadapi beberapa isu strategis yang menjadi tantangan dalam pengelolaan perizinan. GASPOL (Gawai Administrasi Perizinan Online) hadir sebagai solusi untuk mengatasi isu-isu berikut:

3.1. Kompleksitas Birokrasi dalam Pengurusan Perizinan

Proses perizinan sering kali memerlukan berbagai dokumen, tanda tangan dari banyak pihak, dan alur birokrasi yang panjang. Hal ini menyebabkan:

- **Lama waktu penyelesaian:** Pemohon izin harus menunggu berhari-hari hingga berminggu-minggu untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- **Ketidakpastian prosedur:** Kurangnya informasi yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus diikuti oleh masyarakat atau pelaku usaha.
- **Meningkatkan potensi maladministrasi:** Proses manual dan berbelit-belit membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang.

3.2. Rendahnya Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Publik

Di era digital, penggunaan teknologi dalam pelayanan publik masih belum optimal. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi:

- **Sistem manual:** Sebagian besar proses perizinan masih dilakukan secara manual, menggunakan dokumen fisik yang rawan kehilangan atau kerusakan.
- **Keterbatasan integrasi data:** Tidak adanya sistem terpadu antara instansi terkait membuat proses pengurusan izin menjadi tidak efisien.
- **Kurangnya pelatihan SDM:** Aparatur sipil negara (ASN) belum sepenuhnya memiliki kompetensi dalam mengelola layanan berbasis teknologi.

3.3. Minimnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan Manual

Pelayanan perizinan manual yang lambat dan berbelit-belit berdampak pada rendahnya kepuasan masyarakat. Beberapa penyebabnya antara lain:



- **Antrian panjang dan waktu tunggu yang lama:** Masyarakat harus menghabiskan waktu yang signifikan untuk mengurus dokumen di kantor pelayanan.
- **Kurangnya transparansi:** Tidak adanya mekanisme untuk melacak status permohonan izin secara real-time menimbulkan ketidakpastian dan ketidakpuasan.
- **Biaya tambahan tidak resmi:** Proses yang tidak transparan membuka peluang munculnya pungutan liar, sehingga membebani masyarakat.

3.4. Tingginya Beban Administrasi Pemerintah Daerah

Proses perizinan manual juga memberikan beban administrasi yang berat bagi pemerintah daerah. Hal ini mengakibatkan:

- **Penggunaan sumber daya yang tidak efisien:** Banyak tenaga kerja administratif terfokus pada tugas yang dapat diotomatisasi.
- **Kurangnya fokus pada pengembangan kebijakan:** Waktu dan tenaga lebih banyak dihabiskan untuk proses teknis daripada strategis.

3.5. Tantangan dalam Mendukung Iklim Investasi Daerah

Sistem perizinan yang tidak efisien dan lambat dapat menghambat investasi, karena:

- **Kurangnya daya tarik bagi investor:** Pelaku usaha cenderung memilih daerah dengan proses perizinan yang cepat dan sederhana.
- **Tertundanya realisasi proyek ekonomi:** Keterlambatan dalam pengurusan izin dapat menghambat pembangunan sektor-sektor produktif.

3.6. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi tentang Layanan Perizinan

Sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya memahami prosedur perizinan yang berlaku, baik manual maupun digital. Akibatnya:

- **Rendahnya partisipasi masyarakat:** Banyak pelaku usaha, terutama dari sektor UMKM, tidak mengurus izin karena merasa prosesnya rumit.
- **Ketergantungan pada perantara:** Masyarakat cenderung menggunakan jasa pihak ketiga yang sering kali menambah biaya dan potensi masalah.

3.7. Resistensi terhadap Perubahan Teknologi

Implementasi sistem digital seperti GASPOL sering kali menghadapi resistensi, baik dari masyarakat maupun internal organisasi pemerintah. Hal ini meliputi:

- **Kurangnya kepercayaan pada teknologi:** Beberapa masyarakat masih meragukan keamanan dan keandalan sistem digital.
- **Budaya kerja tradisional:** Aparatur sipil negara yang terbiasa dengan cara kerja manual membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem baru.

3.8. Tidak Meratanya Infrastruktur Teknologi

Penggunaan teknologi dalam pelayanan publik memerlukan infrastruktur yang memadai, seperti koneksi internet yang stabil dan perangkat keras yang canggih. Namun, tantangan yang dihadapi mencakup:

- **Keterbatasan akses internet di wilayah tertentu:** Beberapa wilayah pedesaan di Purwakarta belum memiliki akses internet yang memadai.
- **Ketersediaan perangkat digital:** Tidak semua masyarakat memiliki perangkat yang mendukung akses layanan online.

3.9. Regulasi yang Perlu Disesuaikan dengan Transformasi Digital

Perubahan dari sistem manual ke digital memerlukan penyesuaian regulasi agar mendukung transformasi pelayanan. Kurangnya regulasi yang spesifik untuk mendukung e-government menjadi kendala dalam implementasi GASPOL.

Dengan memahami isu-isu strategis ini, GASPOL hadir untuk menjawab tantangan tersebut melalui inovasi pelayanan berbasis teknologi yang transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.

BAB IV IMPLEMENTASI APLIKASI GASPOL

4.1. Kondisi yang Akan Dicapai

1. **Integrasi Sistem GASPOL dengan Sistem Perizinan Nasional (OSS):**

GASPOL akan sepenuhnya terhubung dengan *Online Single Submission* (OSS), sehingga proses perizinan berusaha di Kabupaten Purwakarta dapat dilakukan secara terintegrasi dengan sistem nasional. Hal ini tidak hanya mempermudah pelaku usaha lokal tetapi juga menarik lebih banyak investasi dari luar daerah.

2. **Pengurangan Waktu Pengurusan Izin hingga 50%:**

Dengan otomasi dan digitalisasi proses administrasi, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perizinan akan berkurang signifikan. Contohnya, izin yang sebelumnya membutuhkan waktu 10 hari dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari atau kurang.

3. **Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan:**

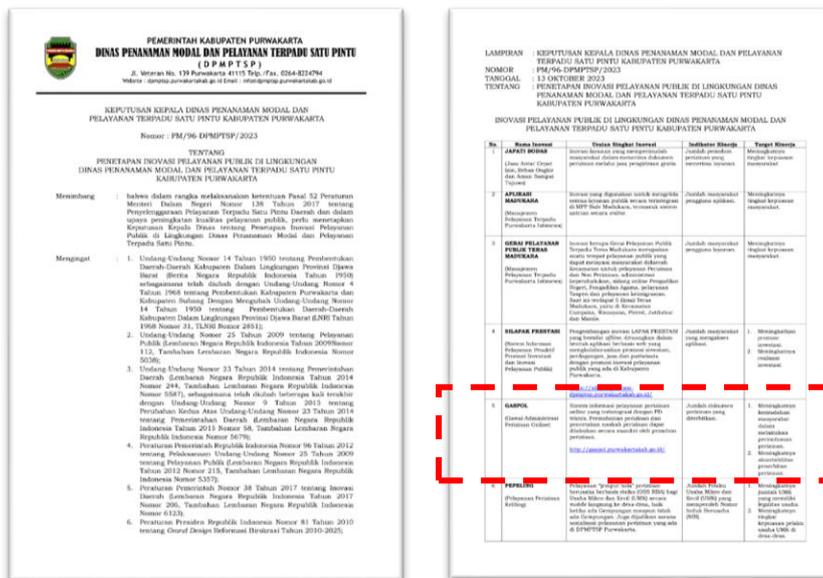
Target tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan GASPOL mencapai 90%, dengan indikator utama berupa kemudahan akses, transparansi proses, dan kecepatan layanan.

4. **Efisiensi Biaya Operasional Pemerintah:**

Pengurangan penggunaan dokumen fisik dan proses manual akan menekan biaya operasional, sehingga alokasi anggaran dapat difokuskan pada pengembangan sistem dan pelatihan SDM.

5. **Peningkatan Kapasitas Digital Aparatur dan Masyarakat:**

Melalui program pelatihan dan sosialisasi, kompetensi pegawai dan pemahaman masyarakat dalam menggunakan sistem GASPOL akan meningkat, mendukung terciptanya ekosistem digital yang lebih inklusif.

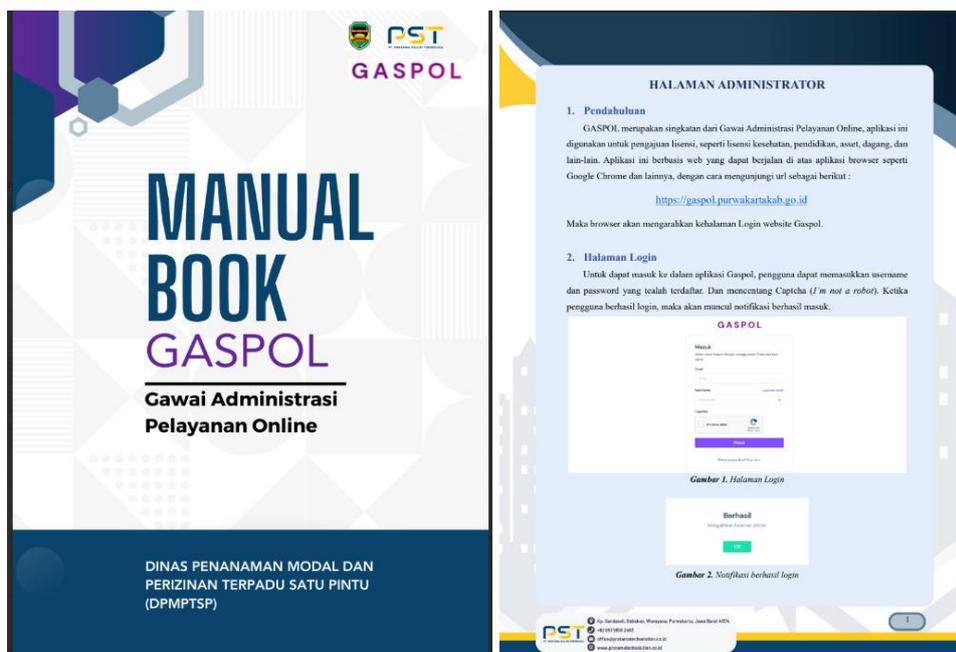


Gambar 3. SK Penetapan Inovasi GASPOL

4.2. Strategi dan Arah Kebijakan Inovasi GASPOL

1. Pengembangan Infrastruktur Digital:

- o Memperkuat kapasitas server, jaringan, dan sistem keamanan data untuk memastikan stabilitas operasional GASPOL.
- o Peningkatan cakupan akses internet hingga ke wilayah pedesaan guna mendukung akses layanan secara menyeluruh.



Gambar 4. Manual Book GASPOL



2. Pelatihan SDM:

- Mengadakan pelatihan intensif bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk mengoperasikan dan mengelola GASPOL dengan baik.
- Menyediakan panduan teknis bagi petugas pelayanan agar mampu menangani permasalahan teknis sederhana secara mandiri.

3. Sosialisasi dan Edukasi:

- Melakukan kampanye masif tentang manfaat GASPOL melalui media sosial, seminar, dan lokakarya.
- Mengadakan pelatihan literasi digital bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).



Gambar 5. Sosialisasi GASPOL kepada Pihak Internal dan Eksternal

4. Kolaborasi:

- Membangun kerja sama dengan pemerintah pusat, swasta, dan perguruan tinggi untuk pengembangan teknologi dan inovasi sistem GASPOL.
- Melibatkan sektor perbankan untuk integrasi pembayaran online dalam sistem perizinan.



Gambar 6. *Focus Group Discussion (FGD)* dengan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)

5. **Monitoring dan Evaluasi:**

Menerapkan sistem evaluasi berkala untuk memastikan bahwa GASPOL berjalan sesuai dengan tujuan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

4.3. **Kekuatan Inovasi GASPOL**

1. **Mempercepat Proses Administrasi Perizinan:**
Sistem berbasis digital memungkinkan pengurusan izin dilakukan lebih cepat, dengan pengurangan hambatan administratif.
2. **Transparansi Data yang Dapat Diakses Secara Real-Time:**
Pemohon dapat memantau status permohonan izin kapan saja dan di mana saja, meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
3. **Meminimalisir Praktik Korupsi:**
Digitalisasi proses mengurangi interaksi langsung antara masyarakat dan petugas, sehingga peluang terjadinya pungutan liar atau penyalahgunaan wewenang dapat ditekan.

4.4. Kelemahan Inovasi GASPOL

1. **Ketergantungan pada Infrastruktur Teknologi:**
Sistem GASPOL sangat bergantung pada infrastruktur teknologi, seperti server dan jaringan internet, yang membutuhkan perawatan rutin dan biaya tinggi.
2. **Rendahnya Literasi Digital Sebagian Masyarakat:**
Masih ada masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi digital, sehingga memerlukan pendampingan atau pelatihan khusus.
3. **Risiko Gangguan Teknis:**
Gangguan teknis seperti pemadaman listrik atau *server down* dapat menghambat kelancaran operasional layanan.

4.5. Tantangan dan Peluang

Tantangan :

1. **Resistensi terhadap Perubahan Budaya Kerja Manual:**
Perubahan dari sistem manual ke digital membutuhkan adaptasi dan perubahan pola pikir, baik dari ASN maupun masyarakat.
2. **Keterbatasan Anggaran untuk Pengembangan Sistem:**
Pengembangan dan pemeliharaan sistem digital memerlukan investasi besar, termasuk dalam hal infrastruktur, pelatihan, dan promosi.

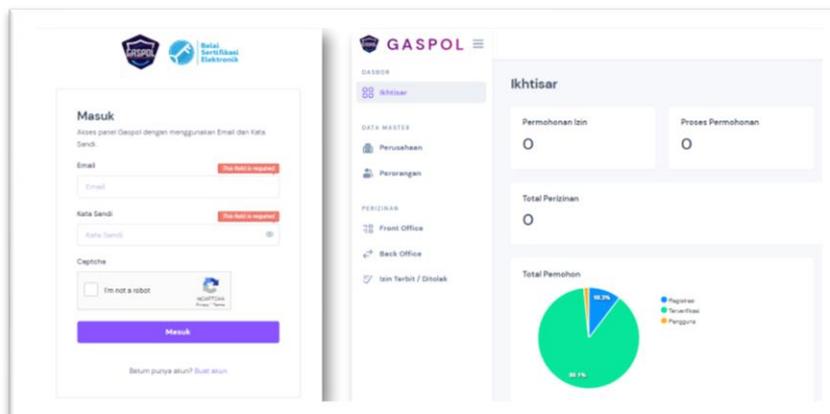
Peluang :

1. **Dukungan Regulasi Pemerintah Pusat:**
Kebijakan nasional yang mendorong digitalisasi pelayanan publik memberikan landasan kuat untuk pengembangan GASPOL.
2. **Peningkatan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Daerah:**
Layanan yang lebih transparan dan cepat melalui GASPOL dapat meningkatkan kepuasan masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi pemerintah daerah.

4.6. Fokus Penguatan Inovasi

1. **Integrasi Layanan dengan Sistem Nasional dan Regional:**
GASPOL akan terus diselaraskan dengan OSS serta sistem layanan publik lainnya di tingkat regional dan nasional.
2. **Peningkatan Literasi Digital Masyarakat dan Pegawai:**
Melalui pelatihan intensif, masyarakat dan ASN akan dilibatkan secara aktif untuk mendukung transformasi digital.
3. **Optimalisasi Layanan Berbasis Mobile:**
Mengembangkan aplikasi GASPOL berbasis *mobile* untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan melalui ponsel pintar.
4. **Peningkatan Keamanan Data:**
Sistem keamanan data akan terus ditingkatkan untuk melindungi informasi pribadi masyarakat dan mencegah ancaman siber.
5. **Peningkatan Layanan Berkelanjutan:**
Melakukan inovasi secara berkala untuk memastikan GASPOL tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.

6.



Gambar 7. Tampilan Antarmuka GASPOL (gaspol.purwakartakab.go.id)

BAB V RENCANA AKSI

5.1. Rencana Aksi

Berikut adalah rencana aksi untuk pengembangan dan optimalisasi GASPOL (Gawai Administrasi Perizinan Online) pada Tahun 2025:

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Penambahan server dan bandwidth	Q1 Tahun 2025	Meningkatkan kapasitas sistem untuk mendukung kelancaran dan stabilitas operasional GASPOL.
2	Pelatihan SDM	Q2 Tahun 2025	Fokus pada peningkatan kompetensi pegawai dalam mengelola sistem GASPOL secara efisien.
3	Sosialisasi ke masyarakat	Q2-Q3 Tahun 2025	Melibatkan UMKM, komunitas lokal, dan pelaku usaha untuk memperkenalkan manfaat dan cara penggunaan GASPOL.
4	Pengembangan fitur aplikasi	Q3 Tahun 2025	Menambahkan fitur baru, seperti pelacakan status permohonan dan notifikasi otomatis melalui aplikasi.
5	Evaluasi dan peningkatan sistem	Q4 Tahun 2025	Melakukan peninjauan dan perbaikan sistem berdasarkan masukan dari pengguna dan hasil evaluasi teknis.

5.2. Roadmap Pengembangan GASPOL

1. Tahun 1: Fase Persiapan dan Implementasi Awal

- **Triwulan 1:**
 - Penambahan server, peningkatan bandwidth, dan penguatan infrastruktur digital.
 - Pengujian sistem untuk memastikan GASPOL dapat berfungsi dengan optimal.

- **Triwulan 2:**
 - Pelatihan intensif bagi pegawai terkait pengelolaan dan pengoperasian sistem.
 - Pembuatan materi sosialisasi, termasuk panduan pengguna dan video tutorial.
- **Triwulan 3:**
 - Pelaksanaan kampanye sosialisasi ke masyarakat melalui seminar, lokakarya, dan media sosial.
 - Menjalin kerja sama dengan komunitas UMKM untuk memastikan mereka terlibat aktif dalam penggunaan GASPOL.
- **Triwulan 4:**
 - Evaluasi pelaksanaan tahap awal, mencakup stabilitas sistem, respon pengguna, dan hasil awal layanan.
 - Penyesuaian dan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi.

2. Tahun 2: Fase Penguatan dan Pengembangan Lanjutan

- **Triwulan 1:**
 - Peningkatan keamanan data dan integrasi dengan *Online Single Submission (OSS)*.
 - Penambahan fitur seperti e-payment dan pengarsipan otomatis.
- **Triwulan 2:**
 - Pengembangan layanan berbasis mobile dengan aplikasi GASPOL.
 - Pelatihan lanjutan bagi pegawai untuk mendukung fitur-fitur baru.
- **Triwulan 3:**
 - Monitoring rutin terhadap penggunaan sistem dan tingkat kepuasan pengguna.
 - Perluasan sosialisasi ke wilayah terpencil dengan pendekatan komunitas.
- **Triwulan 4:**
 - Evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas GASPOL, termasuk masukan dari masyarakat dan pelaku usaha.
 - Penyusunan strategi pengembangan jangka panjang berdasarkan evaluasi.

3. Tahun 3: Fase Optimalisasi dan Perluasan Cakupan

- **Triwulan 1:**
 - Peluncuran layanan berbasis mobile secara penuh.
 - Integrasi dengan layanan pemerintah daerah lainnya untuk menciptakan ekosistem digital terpadu.
- **Triwulan 2:**
 - Peningkatan literasi digital masyarakat melalui program edukasi berkelanjutan.
 - Penguatan jaringan infrastruktur teknologi di wilayah pedesaan.
- **Triwulan 3:**
 - Monitoring sistem secara berkala untuk memastikan performa layanan tetap optimal.
 - Penambahan fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengguna (misalnya pelaporan online).
- **Triwulan 4:**
 - Penyusunan laporan akhir tentang pencapaian GASPOL dalam meningkatkan pelayanan perizinan.
 - Penyusunan rencana strategis untuk inovasi teknologi pelayanan publik selanjutnya.

5.3. Output yang Diharapkan

1. **Tahun 1:** GASPOL diimplementasikan dengan infrastruktur yang memadai, pegawai terlatih, dan masyarakat mulai mengakses layanan secara digital.
2. **Tahun 2:** GASPOL menjadi sistem yang lebih stabil, aman, dan terintegrasi dengan OSS serta layanan berbasis mobile tersedia.
3. **Tahun 3:** GASPOL mencapai tahap optimalisasi, menjadi bagian dari ekosistem layanan publik terpadu, dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara efektif.

Roadmap ini dirancang untuk memastikan keberlanjutan inovasi GASPOL, menjadikannya sebagai model pelayanan publik berbasis digital yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Inovasi GASPOL (Gawai Administrasi Perizinan Online) merupakan langkah strategis yang diambil oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta untuk menjawab tantangan dalam memberikan pelayanan perizinan yang efisien, transparan, dan responsif. Sistem ini dirancang untuk:

- Mempercepat proses administrasi perizinan dengan memanfaatkan teknologi digital.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik melalui fitur pelacakan real-time dan notifikasi otomatis.
- Memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan pelaku usaha, mendukung terciptanya ekosistem investasi yang lebih kompetitif.

Melalui rencana aksi yang terstruktur, termasuk pengembangan infrastruktur, pelatihan SDM, sosialisasi, dan evaluasi berkelanjutan, GASPOL diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Purwakarta serta mendukung pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Namun, untuk mencapai keberhasilan implementasi, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan literasi digital masyarakat, serta keterbatasan anggaran. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta, tantangan ini dapat diubah menjadi peluang.

6.2. Rekomendasi

1. Komitmen Berkelanjutan.

Pemerintah daerah perlu menunjukkan komitmen yang kuat dalam menyediakan anggaran, infrastruktur, dan kebijakan yang mendukung implementasi GASPOL secara berkelanjutan.

2. Peningkatan Literasi Digital

Melalui program sosialisasi dan pelatihan, baik untuk masyarakat maupun aparat pemerintah, literasi digital harus ditingkatkan agar semua pihak dapat memanfaatkan GASPOL dengan optimal.

3. Kolaborasi dan Inovasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu menjalin kerja sama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan komunitas teknologi untuk terus mengembangkan fitur-fitur baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4. Penguatan Infrastruktur Teknologi

Peningkatan kapasitas server, jaringan internet, dan keamanan siber harus menjadi prioritas utama untuk memastikan sistem GASPOL berjalan stabil tanpa kendala teknis.

5. Evaluasi dan Pengembangan Berkelanjutan

Evaluasi berkala perlu dilakukan untuk menilai efektivitas sistem GASPOL, dengan melibatkan umpan balik dari pengguna sebagai dasar untuk pengembangan lebih lanjut.

Dengan langkah-langkah strategis ini, GASPOL diharapkan dapat menjadi contoh inovasi pelayanan publik yang sukses dan inspiratif, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga nasional, mendukung Kabupaten Purwakarta sebagai daerah yang kompetitif dan unggul dalam pelayanan publik berbasis digital.

LAMPIRAN I

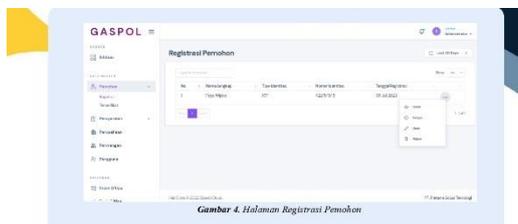
FOTO KEGIATAN PELAKSANAAN INOVASI



Halaman Login



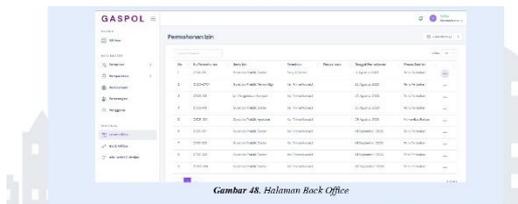
Halaman Dashboard



Halaman Registrasi



Halaman Persyaratan



Halaman Back Office



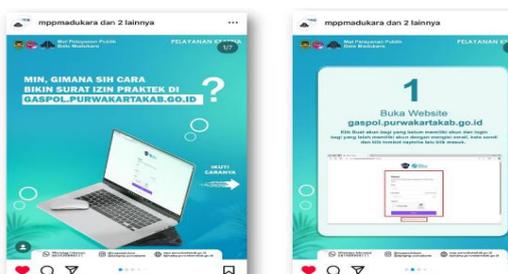
Halaman Tracking



Launching GASPOL

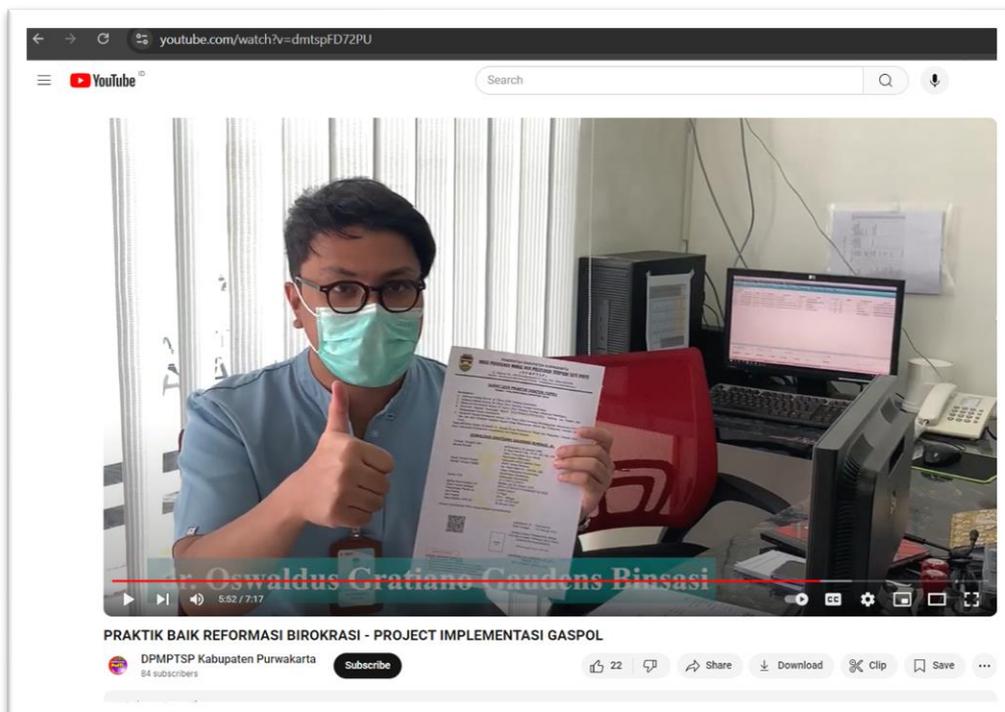
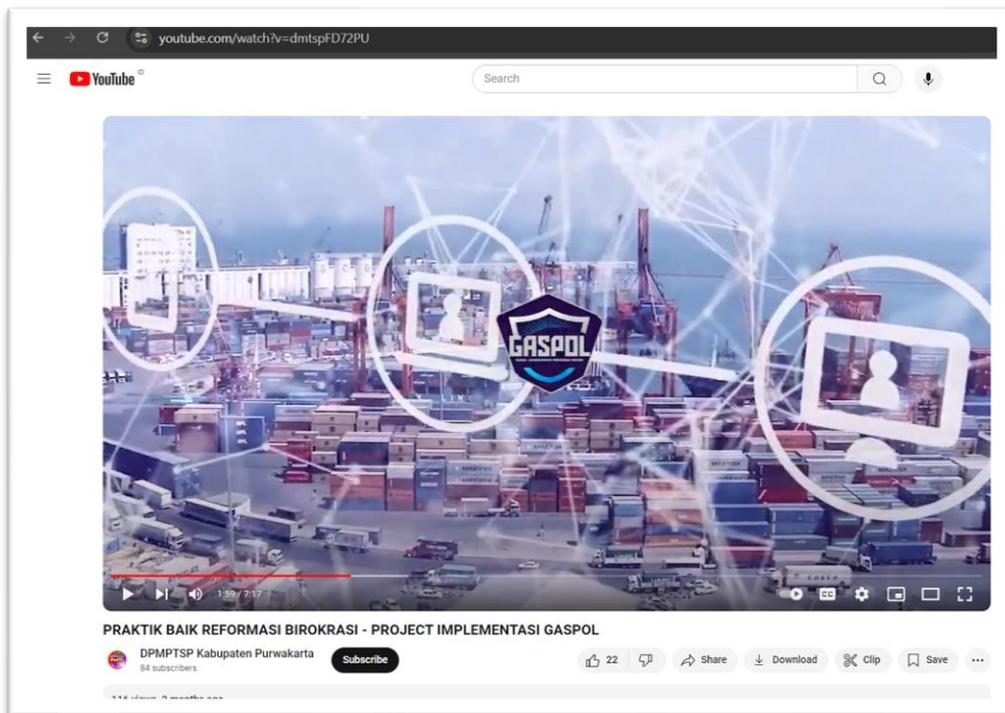


Sosialisasi/Bimtek GASPOL



LAMPIRAN II

VIDEO KEGIATAN



Video inovasi GASPOL telah diupload ke Youtube DPMPTSP

URL : <https://www.youtube.com/watch?v=dmtspFD72PU>



